

PENGELOLAAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN
MIFTAHUL 'AMAL BLORA

TESIS

Diajukan Kepada
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan



Oleh :

SUHARTUTIK

NIM.: Q.100080041

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga pendidikan adalah sebuah aktivitas besar yang di dalamnya ada empat komponen yang saling berkaitan. Empat komponen yang dimaksud adalah Staf Tata Laksana Administrasi, Staf Teknis Pendidikan didalamnya ada Kepala Sekolah dan Guru, Komite Sekolah sebagai badan independen yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa ditempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan operasional sekolah terbentuknya dari hubungan “simbiosis mutualis” keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi kebutuhan anak didik.

Pondok pesantren merupakan wadah untuk membentuk manusia-manusia yang berkualitas, yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama. Pesantren berupaya menyelaraskan antara kehidupan duniawi dan ukhrowi. Diantaranya dengan menggabungkan pelajaran-pelajaran umum dan agama. Dan didukung dengan disiplin yang tinggi maka tak pelak lagi, pesantren banyak menghasilkan manusia-manusia yang bukan hanya berkualitas, tetapi juga manusia-manusia yang bermoral.

Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam sistem penyelenggaraan pondok pesantren yaitu, manajemen sebagai faktor upaya, organisasi sebagai faktor sarana, dan administrasi sebagai faktor karsa. Ketiga faktor ini memberi

arah dan perpaduan dalam merumuskan, mengendalikan penyelenggaraan, mengawasi serta menilai pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam usaha menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pondok pesantren masing-masing.

Sudah menjadi *common sense* bahwa pesantren lekat dengan figur kyai. Kyai dalam pesantren merupakan figur sentral, otoritatif, dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan. Hal ini erat kaitannya dengan dua faktor berikut. Pertama, kepemimpinan yang tersentralisasi pada individu yang berstandar pada kharisma serta hubungan yang bersifat paternalistik. Kebanyakan pesantren menganut pola "serba mono" mono manajemen dan mono administrasi sehingga tidak ada delegasi kewenangan ke unit-unit kerja yang ada dalam organisasi. Kedua, kepemilikan pesantren bersifat individual, bukan komunal. Otoritas individu kiai sebagai pendiri sekaligus pengasuh pesantren sangat besar dan tidak bisa diganggu gugat. Faktor nasab (keturunan) juga kuat sehingga kiai bisa mewariskan kepemimpinan pesantren kepada anak (istilahnya putra mahkota) yang dipercaya tanpa ada komponen pesantren yang protes. Sistem alih kepemimpinan di pesantren seperti ini kerap kali mengundang sindiran bahwa pesantren lainnya : "kerajaan kecil".

Sejalan dengan penyelenggaraan pendidikan formal. Memang beberapa pesantren termasuk mengalami perkembangan aspek manajemen, organisasi, dan administrasi pengelolaan keuangan. Dari beberapa kasus, perkembangan ini dimulai dari perubahan gaya kepemimpinan pesantren; dari kharismatik ke rasionalistik, dari otoriter paternalistik ke diplomatik partisipatif, atau dari *laissez*

faire ke demokratik. Pengaruh sisitem pendidikan formal menuntut kejelasan pola hubungan dan pembagian kerja di antara unit-unit kerja.

Dalam pengelolaan pondok sebagai suatu lembaga pendidikan, peran kyai sangat besar dalam menentukan tujuan dan kegiatan yang harus dilakukan. Keadaan ini telah menjadikan hampir seluruh pengelolaan sumberdaya baik fisik ataupun finansial banyak ditangani langsung oleh kyai atau oleh keluarga kyai dengan bantuan santri yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatan keseharian dan pendidikan pondok pesantren. Secara umum, kepengurusan dalam pesantren terdiri dari kyai, guru/ustadz, pengurus pondok pesantren, pimpinan unit-unit kegiatan dan tenaga kesekretariatan pondok pesantren.

Pesantren sebagai salah satu lembaga yang telah diakui oleh pemerintah. Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren sebenarnya memiliki tempat yang istimewa. Namun, kenyataan ini belum disadari oleh mayoritas masyarakat muslim. Karena kelahiran Undang-undang ini masih amat belia dan belum familiar dikalangan Pesantren di Indonesia.

Keistimewaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat kita lihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang-undang Sisdiknas sebagai berikut: Dalam Pasal 3 UU Sisdiknas dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan di Pesantren.

Pesantren sudah sejak lama menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia. Sehingga format pesantren kedepan haruslah mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain dengan menata kembali manajemen yang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Kenyataan di lapangan hingga saat ini masalah keuangan pesantren selalu menjadi kendala dalam melakukan aktivitas pesantren, baik yang berkaitan dengan anggaran, akuntansi, penataan administrasi, alokasi serta kebutuhan pengembangan pesantren maupun dalam proses aktivitas keseharian pesantren. Tidak sedikit pesantren yang memiliki sumberdaya baik manusia maupun alamnya tidak tertata dengan rapi, dan tidak sedikit pula proses pendidikan pesantren berjalan lambat karena kesalahan dalam penataan manajemen keuangannya.

Sebagai implementasi dari paradigma manajemen pendidikan yang ada di Indonesia, MBS Manajemen Berbasis Sekolah, masalah keuangan dan pembiayaan menjadi lebih banyak di atur oleh lembaga pendidikan itu sendiri, tidak terkecuali pesantren. Walaupun sebenarnya pesantren dari dahulu sejak awal berdirinya memang adalah lembaga yang mandiri dalam penataan manajemennya. Namun alangkah lebih baik jika pesantren bisa mengadopsi penataan manajemen

yang bisa membawa kemaslahatan umat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari prinsip Pesantren, (*al-muhafadhoh 'ala al-qodim as-sholih – wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah*) menjaga tradisi lama yang bermanfaat dan mengadopsi hal-hal baru yang banyak membawa mashlahat.

Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan agar menjadi lembaga pendidikan yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan. Manajemen keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang professional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya.

Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena lembaga pendidikan harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.

Banyaknya sekolah berstandar nasional, merupakan kemajuan demi terciptanya kualitas-kualitas insan peserta didik. Demikian halnya dengan Pondok Pesantren Miftahul Amal Blora, yang merupakan pondok pesantren tentunya sangat berharap agar kualitas insan peserta didik dapat meningkat. Pengelolaan pondok pesantren akan menjadi baik manakala disertai dengan pengelolaan keuangan yang baik, karena dengan semakin banyaknya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak ke pondok tentunya akan meningkat pula penggunaan dan penerimaan dana pondok khususnya yang bersumber dari masyarakat.

Penggalian sumber-sumber dana pada pondok pesantren pada dasarnya mempunyai peran yang dominan untuk mendukung kehidupan pondok, sehingga kyai dan ustadz serta pengurus pondok pesantren harus berusaha keras untuk menggali dana guna mendukung operasional pondok. Sumber dana yang menjadi andalan pondok khususnya Pondok Pesantren Miftahul 'Amal di Blora adalah dari donatur, dan simpatisan pondok. Sedangkan sumber dana yang berasal dari usaha pondok, hingga saat ini masih terbatas, terlebih sumber dana dari para santri dan wali santri, sangat tidak mendukung operasional pondok.

Keterbatasan sumber dana Pondok Pesantren Miftahul 'Amal di Blora tersebut mengharuskan kyai dan pengurus pondok mengalokasikan biaya secermat mungkin dengan tetap berprinsip pada: hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan, terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggung jawabkan serta disertai bukti penggunaannya, dan Sedapat mungkin

menggunakan kemampuan/ hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan.

Pengelolaan keuangan sekolah, khususnya Pondok Pesantren Miftahul Amal Blora, hingga saat ini masih menemui berbagai permasalahan, antara lain adanya beberapa pihak yang menilai bahwa pengelolaan keuangan tidak transparan, dan tidak efisien. Selain itu ada beberapa sumber pendapatan tetapi pengalokasian yang kurang tepat pada sasaran kegiatan. Dilatarbelakangi oleh permasalahan tersebut di atas, penulis melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Miftakhul Amal Blora.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah "Bagaimanakah karakteristik pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Miftahul 'Amal di Blora?". Fokus penelitian tersebut dibagi dalam dua sub fokus :

1. Bagaimana karakteristik penggalan sumber-sumber pendapatan Pondok Pesantren Miftahul 'Amal di Blora?
2. Bagaimana karakteristik alokasi dana untuk membiayai kegiatan Pondok Pesantren Miftahul 'Amal di Blora?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penggalan sumber-sumber pendapatan Pondok Pesantren Miftahul 'Amal di Blora.
2. Untuk mengetahui alokasi dana untuk membiayai kegiatan Pondok Pesantren Miftahul 'Amal di Blora.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu para pengelola pondok pesantren sebagai bahan masukan pengelola pondok pesantren untuk meningkatkan kinerja keuangan pondok pesantren.
2. Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi keilmuan di UMS, khususnya Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya dalam hal manajemen keuangan pondok pesantren.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan menyusun rencana pendapatan dan belanja (penganggaran), melaksanakan prosedur anggaran, prosedur akuntansi keuangan, pembelanjaan, prosedur investasi, dan prosedur pemeriksaan.
2. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dikelola santri di bawah naungan Kyai.